

**IMPLEMENTASI PENATAAN PEMERINTAH YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**



Diterima: 18 Desember 2023; Direvisi: 29 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Isep H. Insan¹, Hilda Husnul Khotima², M. Dhanu Fitriansyah³

Abstrak

Dalam konteks penggunaan sumber daya alam suatu negara, tata kelola yang baik didefinisikan sebagai suatu proses tata kelola yang melibatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dan ditelaah secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan menggabungkan reaktivitas yang tegas dengan pandangan ke depan dan dengan tetap memperhatikan cita-cita tanggung jawab, transparansi, keterlibatan, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan efisiensi dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, gagasan tata kelola yang baik bersifat global. Oleh karena itu, gagasan ini harus diimplementasikan baik oleh pemerintah federal maupun pemerintah daerah selama proses organisasi negara karena sifatnya yang komprehensif dan luas. Dengan tujuan agar terfasilitasi dan berjalan dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemerintah, Ekonomi

¹ Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, isep@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, hilda@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, dhanu@gmail.com

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintah saat ini Good Governance merupakan titik didalam suatu negara, yang bermaksud guna menumbuhkan kesejahteraan sosial. Membangun masyarakat yang sejahtera dapat dicapai melalui bantuan Tata Pemerintah yang baik, yang merupakan cara pemerintah menjalankan pemerintahan didalam negara. Dalam konteks memberi layanan ke warga, good governance sudah jadi masalah utama karena di era globalisasi, pemerintahan yang baik diperlukan seiring dengan peningkatan pengetahuan Masyarakat.

Prosesnya berinteraksi sosial politik diantara pemerintahan serta sosial atas beragam kegiatan harus memperhatikan tautan sinergis diantara pemerintah, bagian swasta serta penduduk. Maka dibangun dengan komunikasi yang terus terstruktur dengan tepat di antara tiga pilar tersebut untuk mencapai pembangunan negara yang mandiri. Membangun demi kesejahteraan masyarakat dibutuhkan komunikasi, juga antisipasi dari pemerintah, sektor swasta serta keterlibatan masyarakat. Pembangunan di negara Indonesia khusus nya di di wilayah tetap dilakukan menggunakan berbagai program. Karena itu diperlukan pendekatan yang pelaksanaannya mengikutsertakan Masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, pendekatan partisipasi sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, dan membiayai pembangunan.

Masyarakat sudah sewajarnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena pemerintah bekerja untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat. Penguatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan adalah tujuan dari upaya ini. Dengan memanfaatkan peran masyarakat maka penyelenggaraan pembangunan akan dilakukan dengan lebih jelas, jujur, dan berorientasi pada rakyat atau dengan bernuansa pemerintahan yang baik di semua tingkatan.

Semua penduduk mempunyai hak guna ikutserta atas pembikinan kebijakan pelayanan public. Namun partisipasi tersebut bukan merupakan kewajiban, melainkan merupakan aktivitas yang dilaksanakan atas usaha guna memenuhi haknya dasar sosial sesuai Undang-Undang No. 9/2015 Tentang PEMDA, meletakkan keikutsertaan penduduk jadi komponen krusial dalam meraih maksud kesejahteraan sosial, menciptakan rasa mempunyai warga atas pengurusan PEMDA, menjaminnya keterbukaan, akuntabilitas serta keperluan umumnya.

Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Tata Pemerintah Yang baik

Peran masyarakat sendiri yaitu suatu kegiatan yang melibatkan pandangan serta emosi individu saat membuat keputusannya serta memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan kelompoknya. Keikutsertaan itu penting dalam mengambil andilnya di dalam pemerintah dengan cara menggunakan hak untuk menyuarakan gagasannya atas cara pengutipan keputusannya yang berkaitan dengan keperluan sosial baik secara terus menerus maupun tak terus menerus dengan terarah.

Peran Pemerintah Pusat

Fungsi dan peran dari pemerintah pusat sendiri yaitu sebagai fasilitator, fungsi koordinasi dan menjalankan fungsi pemberdayaan dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan. Adanya pemerintahan demokratis adalah tanda tata kelola pemerintah yang positif, pemerintah yang demokratis memungkinkan kritik serta rakyat memiliki kontrol atas pemerintahan.

Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan dalam merumuskan suatu kebijakan berdasarkan pada kaidah perumusan kebijakan yang efektif dan efisien.

B. Metode Penelitian

Teknik penelitian yang dipakai guna menata jurnal tersebut yakni Analisa data melalui kualitatif. Teknik kualitatif memfokuskan perhatiannya atas persoalan ataupun peristiwa-peristiwa yang sudah ada. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi Analisis Website dengan dianalisis kembali menggunakan metode Re To Search dan setelah itu oleh penulis di klasifikasi secara menyeluruh.

C. Hasil dan Pembahasan

Korupsi Administrasi dan politik dihindari melalui Tata Kelola Pemerintah yang positif melalui pemerintahan dalam mencakup perihal-perihalnya yakni :

Hubungan antara Pemerintah dan Pasar

Tautan diantara pemerintahan serta pasar, yaitu bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengontrol harga sehingga sesuai dengan harga pasar. Hal ini bertujuan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya yang tidak mahal.

Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat

Tautan diantara pemerintahan serta warga ini menyangkut ikatan pelayanan dan perlindungan yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya.

Hubungan antara Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan

Kaitan diantara pemerintahan serta kelompok sosial yaitu pemerintah memberi peluang ke kelompok masyarakat guna ikutserta.

Bentuk partisipasi yang dilakukan yaitu dalam pembangunan negara, baik dari segi sumber daya manusia dan fasilitasnya.

Hubungan antara Pejabat yang Dipilih dan Pejabat yang Diangkat

Tautan diantara petinggi yang dipilih serta pejabat yang diangkat atau birokrat yakni melangsungkan rapat antar tokoh penduduk, politisi serta birokrasi.

Hubungan antara Lembaga Pemerintah Daerah dan Penduduk

Tautan diantara Lembaga PEMDA serta warga, baik pedesaan atau perkotaannya dengan memberi izin tinggalnya. Izin tinggal ini diberikan ke warga pedesaan yang sedang kerja di daerah perkotaannya.

Hubungan antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif

Hubungan diantara lembaga legislatif serta eksekutif yang dilakukan pada hal pembahasan RUU.

Hubungan Pemerintah Nasional dan Lembaga Internasional

Tautan pemerintahan nasional serta Lembaga-lembaga internasional yaitu dengan bekerjasama atas semua bidang kehidupan demi kemajuan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu struktur pemerintahan yang mencakup Tata Kelola Pemerintahan yang positif yaitu adanya tautan pemerintah serta rakyat. Persyaratan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dapat dijabarkan melalui:

1. Efisiensi

Dalam suatu pemerintahan harus mewujudkan efektivitas manajemen di sektor publik.

Hal ini bisa dilakukan dengan memasukkan metode manajemen perusahaan ke dalam sistem pemerintahan negara. Selain itu juga dengan melaksanakan desentralisasi pemerintahan.

2. Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas publik, dimana setiap tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini harus dilakukan karena pemerintah dipilih oleh rakyat jadi tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.

3. Perangkat Hukum

Ketersediaannya perangkat hukum yang mencukupi berbentuk aturan UU.

Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

4. Akses Masyarakat
Adanya jaminan akses masyarakat yang dijamin oleh sistem informasi terhadap kebijakan atau informasi yang sumbernya dari pemerintahan maupun elemen swasta.
5. Transparansi
Adanya sebuah transparansi dalam pembuatan kebijakan dan juga penerapannya dalam kehidupan. Hal ini dilakukan agar hak masyarakat untuk mengetahui keputusan yang dibuat pemerintah bisa terjamin.

Prinsip-Prinsip Good Governance

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa kualitas ataupun asas-asas yang melandasi tata kelola pemerintah yang positif yakni diantaranya baik (Mulyawan, 2009: 20-23) (Nurimansyah et al. 2020)

1. Keterlibatan Untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka, setiap individu ataupun penduduk mesti mempunyai wewenang suara yang setara.
2. Hukum Landasan hak asasi manusia dan supremasi hukum harus adil, ditegakkan, dan dihormati.
3. Agar transparansi bisa dipakai jadi instrumen untuk pemantauan serta penilaian, transparansi harus diintegrasikan ke dalam kerangka arus informasi yang bebas. Berbagai prosedur, organisasi, serta penjelasan bisa diaksesnya secara independent atas mereka yang memerlukannya. Selain itu, berita mesti disediakan dengan cara yang mencukupi serta sederhana dipahami.
4. Reaktivitas Setiap operasi lembaga harus difokuskan untuk melayani kepentingan para pemangku kepentingan yang berbeda.
5. Berorientasi pada Konsensus Untuk mendapatkan keputusan yang paling baik bagi kepentingan semua pihak, tata kelola yang baik akan menjadi penengah di antara berbagai kepentingan yang berbeda.
6. Kesetaraan (Parity),
Pria serta wanita akan mempunyai peluang yang setara guna mengejar kepentingan mereka dan/atau kepentingan bersama melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Efisiensi dan Efektivitas
Setiap prosedur dan organisasi dimaksudkan guna menciptakan sesuatu yang betul-betul memenuhi persyaratan melalui memanfaatkan sumber daya yang berbeda yang ada.
8. Tanggung Jawab,
Baik pemilik maupun publik (masyarakat umum) meminta pertanggungjawaban dari para pengutip ketetapan atas kelompok bagian pelayanan serta anggota masyarakatnya (stakeholder). Pertanggungjawaban ini berbeda tergantung pada apakah keputusan yang dibuat oleh organisasi dibuat secara internal atau eksternal.
9. Pandangan strategis
Karena mereka menyadari perlunya pertumbuhan manusia, para pemimpin dan warga negara memandang tata kelola pemerintahan yang efektif dari sudut pandang yang luas dan berjangka panjang. Mereka juga menyadari faktor sosial, budaya, dan sejarah yang telah membentuk cara pandang mereka.
10. Saling ketergantungan,
bahwa setiap ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang efektif yang telah disebutkan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya serta saling menguatkan, mereka tak berdiri sendiri.

Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa metode penelusuran lokasi (transek) dalam pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) sangat penting guna melaksanakan pengawasan terus menerus atas area serta sumber daya penduduk melalui kunjungan desa secara berkelompok dan transek yang dimulai dari titik terendah di desa dan berakhir di titik tertinggi, baik yang telah diamati maupun yang telah dimodifikasi sesuai kesepakatan masyarakat.

Dasar dari tata kelola pemerintah yang baik yakni manajemen pemerintahan, di mana penerapan kata "baik" berarti bahwa semua keputusan pemerintah harus dibuat sesuai dengan cita-cita dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Perilaku dan kapasitas masyarakat untuk mengelola kebutuhan dan kepentingan bersama dengan memanfaatkan kinerja pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik disebut sebagai tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, aturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik ialah sistem pemerintahannya yang mampu menetapkan serta mengimplementasikan standar-standar profesionalisme, akuntabilitas, keterbukaan, layanan maksimal, demokrasi, efisiensi, efektifitas, dan supremasi hukum, serta mampu diterimanya atas masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan Good Governance

Mendorong pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara merupakan tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik, karena perihalnya hendak menumbuhkan mutu hidup warga serta mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Karena masyarakat dianggap bahagia ketika kehidupan mereka dikelola oleh institusi yang berpengetahuan luas, transparan, akuntabel, dan memiliki birokrasi yang tulus, maka tata kelola pemerintah yang baik sangatlah penting, yang hendak memberi hasil guna beberapa negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pemerintahan akan mengikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Wilayah Indonesia Yang Telah Berhasil Mencapai Good Governance

Wilayah di negara Indonesia yang sudah dinyatakan sebagai Good Governance yaitu ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia telah mengangkat Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui fakta bahwa BPKP menulis buku Best Practise mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, yang menyatakan bahwa Jawa Tengah jadi mdoelan akan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang ingin menerapkan tata kelola pemerintah yang baik melalui penduduk, pemerintah, dan pembangunan untuk mencapai keputusan dan pembangunan secara efisien dan mencegah kesalahan dalam alokasi masyarakat dan investasi di pemerintahan. Sebagaimana yang kemudian dijadikan tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan jadi proses untuk mencapai pilihan dan melaksanakannya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, sebagai kesepakatan yang diputuskan oleh sektor publik, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan sebuah negara. Jadi, ada pertanggung jawaban yang dikelola bersama dalam pemerintah kepada masyarakat setempat seperti yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah.

Good Governance Dalam Mengambil Alih Keberhasilan Di Dalam Otonomi Daerah Sebagai Cara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan

1. Untuk keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraannya serta keadilannya, diperlukan percepatan serta pola sektoralnya yang menekankan pada

- domain negeri ke desain regional dan ikutserta yang menggabungkan fungsi pemerintah, warga sipil serta bagian swasta atas tata pemerintah yang positif.
2. Masyarakat lokalnya sendiri yang mengutip ketetapan serta bertanggungjawab atas pemerintahan yang baik terlihat jelas atas tiap tahap pembangunan, awalnya atas tahapan perancangan, pelaksanaan serta penilaian agenda pembangunan.
 3. Kemajuan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, serta masyarakat demokratis yang adil dan merata. Oleh karena itu, pengaplikasian asas-asas keadilan dan tata kelola pemerintah yang baik oleh para pelaku atas pelaksanaan otonomi daerah merupakan prasyarat bagi pelaksanaannya yang efektif.
 4. Dalam ranah sosial, peekonomian, politik, pertahanan, serta keamanan, tanggung jawab pemerintah adalah mengawasi tatanan kehidupan yang beragam.
 5. Membangun sistem anggaran dan manajemen keuangan daerah yang efektif. Jika pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang kuat, tujuan ini dapat dicapai. Lebih lanjut, menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 11 ayat (1), "penyelenggaraan urusan pemerintahan dibaginya berlandaskan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, serta efisiensi melalui memerhatikan tautan diantara susunan pemerintahan." Dengan kriteria akuntabilitas itu sendiri, kami mengimplikasikan bahwa individu yang bertanggung jawab untuk mengatur suatu urusan pemerintahan dipilih berdasarkan seberapa dekat mereka dengan keluasan, kedalaman, dan keragaman dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan urusan tersebut. Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai seberapa dekat tanggung jawab setiap aktor tata kelola pemerintahan yang baik dipenuhi sesuai dengan hukum dan juga memperjelas apa saja kewajiban-kewajiban tersebut. Setiap pelaku tata kelola pemerintahan yang baik dapat beroperasi dalam koridor akuntabilitas yang transparan jika persyaratan ini terpenuhi.
 6. Keselarasan dan penyelenggaraan administrasi pembangunan Indonesia yang mengamanatkan pembuatan rencana strategi yang menggabungkan visi untuk setiap daerah dan unit kerja pemerintah. Dengan demikian, dalam rangka menjalankan otonomi daerah, setiap daerah harus berpegang pada prinsip visi strategis demi terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik.

D. Kesimpulan

Good Governance pada dasarnya merupakan suatu tatanan pembangunan yang dilaksanakan atas pemerintahan pusat atau PEMDA sebagai wujud atas hasil kinerja pemerintah dalam mencapai kesejahteraan pembangunan sesuai dengan strategi kelola suatu perencanaan. Good Governance dilakukan atas kerja sama dari pemerintah, masyarakat, pemilik sektor usaha dalam mencapai suatu kesejahteraan dalam bentuk sosial, ekonomi maupun politik. Implikasi Tata Pemerintahan dapat dikatakan Good Governance dalam perencanaan pembangunan apabila:

1. Masyarakat memiliki sifat kritis dalam pola pikir dan penyampaian pendapat mengenai pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana mencerminkan negara yang demokrat.
2. Pemerintah melakukan transparansi dana kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui anggaran dana yang dikeluarkan dalam melakukan suatu pembangunan dan dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah yang mencakup kepatuhan pemerintah atas UU serta aturan yang berlakunya guna meningkatkan pengawasan publik terhadap pembangunan dan pelayanan

Referensi

Akadun. (2007). Good Governance. *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities*, pp. 37-47. Universitas Padjajaran

- F. Handayani, M. N. (2019, Juni). Jurnal Pemikiran Administrasi. pp. 1-11.
- N. Andi. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah Di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa. Jurnal Arajang Universitas Sulawesi Barat, pp. 76-91.
- Nabil Adlani. (2021, Oktober Sabtu). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Struktur dan Persyaratan). adjar.id, p. 11.00.
- Resky, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance. pp. 25-36. Universitas Islam Negeri Bandung. (2019, juni 11). Implementasi Good Governance Di Indonesia. p. 3. Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (n.d.).
- Y. Linawati, H. Suzantia, M. Wibowo. (2021, maret). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, pp. 133-144.